

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI PEDESAAN

Telaahan atas tulisan David C. Korten

Badrun Susantyo

Abstract. Participation is like a small coin, one side to assume the shape of participation with their whole and the other side to show the spirit of participation. Community participation are a develop paradigm to focusing the involved of community, beginning from planning. Community participation has an opportunity to influence the policy of development, to answered what the people needed. Through the participation, people knowing their problem and how to solved. Besides it, they have resources to improved their live good.

Key words : Participation, local community, rural development.

I. PENDAHULUAN

Dalam tulisannya tentang “Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Pedesaan”, David C. Korten mengulas tentang pentingnya partisipasi aktif yang penuh kesadaran dari masyarakat dalam setiap program pembangunan di pedesaan. Korten menunjukkan 3 (tiga) contoh keberhasilan program pembangunan pedesaan dengan basis partisipasi masyarakat, yang sebelumnya didahului kegagalan-kegagalan. Ketiga contoh kasus keberhasilan program pembangunan pedesaan dengan basis partisipasi masyarakat tersebut adalah: 1) Kasus pada Badan Pengembangan Produk Susu Nasional India (*National Dairy Development Board/NDDB*); 2) Komite Pembangunan Pedesaan Bangladesh (BRAC) dan; 3) Pelayanan Keluarga Berencana Berbasis Desa di Thailand.

Keberhasilan yang dicapai oleh ketiga contoh kasus tersebut merupakan anti klimaks atas kejenuhan masyarakat akan

penyelenggaraan program pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Kejenuhan ini bisa saja berasal dari adanya pelanggaran etis normatif oleh para pelaksana dalam “organisasi pembantu”, masyarakat sebagai sasaran program merasa tidak atau kurang dilibatkan, sehingga menggores minat serta adanya ketidaksesuaian dengan nilai maupun tradisi setempat. Atau masyarakat merasa program pembangunan yang dijalankan tidak sesuai dengan kebutuhannya. Di sini terlihat, bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan merupakan hal strategis. Dengan demikian, dalam setiap pembangunan (terlebih pada area pedesaan), amatlah penting menggali kembali aspek-aspek strategis dari partisipasi masyarakat. Karena hal ini akan semakin mempermudah proses belajar bagi para perencana dan pelaksana pembangunan dalam memahami segenap aspek strategis dari partisipasi masyarakat.

Ulasan Korten menjadi menarik, manakala kita mencermati pada program-program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan di Indonesia selama ini. Meskipun belum pernah dilakukan evaluasi menyeluruh atas semua kegiatan pemberdayaan masyarakat, boleh jadi pihak-pihak terkait akan mengklaim program yang telah dikemas sedemikian rupa “berhasil mencapai tujuan”. Namun sejauhmana pengukuran tingkat keberhasilan program itu dan ketepatan paramaternya, masih perlu dikaji ulang.

II. PARTISIPASI MASYARAKAT

Dalam mendefinisikan partisipasi masyarakat perlu dilakukan dengan hati-hati, karena istilah “partisipasi masyarakat” memiliki pengertian yang relatif dan dapat dimasuki oleh berbagai kepentingan. Ada tiga variasi dalam pelaksanaan partisipasi. *Pertama*, pendapat bahwa perencanaan ekonomi harus dilaksanakan oleh para ahli. Konsumsi pada waktu sekarang perlu dikorbankan demi penanaman modal di masa datang, dan karena itu kebijaksanaan yang paling tepat untuk mencapai itu haruslah dilaksanakan oleh suatu pemerintahan yang otoriter tapi progresif, yang bebas dari tekanan umum. Partisipasi masyarakat diperlukan disini, tetapi lebih dalam bentuk mobilisasi untuk mendukung program pemerintah. *Kedua*, partisipasi dibangkitkan oleh pemerintah tetapi secara terbatas (*limited political participation*). Untuk mendukung program perdesaan partisipasi perlu didorong, tetapi partai politik tetap tidak diizinkan. Pemerintah membutuhkan dukungan rakyat, tetapi membatasi partisipasi mereka. *Ketiga*, partisipasi dilaksanakan dalam skala penuh (*full scale participation*). Dalam partisipasi skala penuh ini rakyat diperbolehkan untuk ikut dalam pembangunan di berbagai tingkatan (Weiner dalam Rahardjo, 1989). Oleh karena

itu, mereka mempunyai peluang untuk mempengaruhi jalannya kebijakan pembangunan dan mengajukan tuntutan perbaikan nasib.

Selanjutnya, Bintoro Tjokroamidjojo (Rahardjo, 1986) mengemukakan pengertian partisipasi dalam hubungannya dengan proses pembangunan, bidang ekonomi khususnya, yaitu : 1) keterlibatan dalam penentuan arah, strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini bukan saja berlangsung dalam proses politik, tetapi juga dalam proses sosial yaitu hubungan antara kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat; 2) keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam bentuk sumbangan dalam mobilisasi pembiayaan pembangunan, kegiatan produktif yang serasi, pengawasan sosial atas jalannya pembangunan, dan lain-lain; dan 3) keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan. Dari banyak pengertian partisipasi, Bintoro melihat ada dua cara berpartisipasi yaitu : 1) mobilisasi kegiatan-kegiatan masyarakat yang serasi untuk kepentingan-kepentingan pencapaian tujuan pembangunan; dan 2) peningkatan otonomitas, swadaya, dan swakarsa masyarakat sendiri, terutama ditujukan kepada sektor swasta, bidang pertanian dan sebagainya melalui mekanisme pasar dan harga.

Sehubungan dengan pembangkitan swadaya dan swakarsa masyarakat, Sayogyo menjelaskan partisipasi masyarakat meliputi arti ikut melaksanakan dan ikut mengenyam hasil pembangunan, serta hal penting yang melampaui makna tersebut, yaitu dengan memberikan tanggung jawab yang dikerjakan secara berkelompok atau usaha bersama yang mereka bentuk sendiri. Agar dengan kekuatan dan kesadaran yang dibina,

lapisan yang tertinggal dalam pembangunan dapat mengangkat diri kepada martabat yang lebih tinggi. Orang lain tak dapat melakukan proses itu untuk mereka (Sitorus, dkk, ed, 1996). Terkait dengan hal tersebut, Uphoff dan Cohen menyebutkan empat kegiatan dalam partisipasi, yaitu membuat keputusan, pelaksanaan, memperoleh hasil (keuntungan), dan penilaian terhadap seluruh kegiatan (Soelaiman, 1998).

Dengan demikian pengertian ini menunjukkan sifat kelembagaan dari partisipasi itu, atau juga dikenal dengan istilah pelebagaan teknik sosial (Cernea, 1993). Pelebagaan teknik sosial ini selanjutnya dijadikan sarana yang berasal dari kepedulian publik untuk menginvestasikan sumber daya manusia (*human capital*). Termasuk di dalamnya pengembangan co-manajemen partisipasi yang mengandung sistem intensif untuk pengawasan kelembagaan, pengenalan inovasi, peningkatan kohesi sosial, dan solidaritas kepercayaan organisasi yang mandiri, serta nilai-nilai yang menyatukan kelompok. Sebagai salah satu aspek dari teknik sosial, partisipasi juga sebagai sarana untuk memelihara dan meningkatkan sumberdaya.

Memperhatikan beberapa pengertian partisipasi masyarakat tersebut, maka unsur penting yang perlu dipertimbangkan dalam partisipasi masyarakat ialah inisiatif dan proses pengambilan keputusan yang dipusatkan pada masyarakat atau yang berakar dari bawah; baik komunitas yang ada di perdesaan maupun perkotaan. Partisipasi sebagai sarana aktualisasi budaya, sumberdaya manusia, aspirasi politik, kegiatan produksi yang digerakkan secara bersama, aktif dan bertanggung jawab, dilakukan secara optimal oleh masyarakat. Sehubungan dengan itu, posisi masyarakat sebagai faktor kontrol, produk

nilai, memiliki kekuatan untuk memelihara keseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya. Oleh karena itu, pembangkitan partisipasi masyarakat akan memberikan sumbangan bagi keberlanjutan pembangunan.

III. ASPEK STRATEGIS PARTISIPASI MASYARAKAT

Salah satu bagian penting dari aspek strategis partisipasi masyarakat, bahwa masyarakat memiliki pengalaman tersendiri berupa kearifan yang timbul dari proses interaksi terus menerus dengan sumber alam dan lingkungannya, merespon dan mendinamisasi sekaligus mengendalikan hubungan-hubungan antar kelompok untuk mewujudkan sistem jaringan sosial yang kuat dan saling melindungi serta saling memberi manfaat (Susantyo, 2002). Sebagaimana sejarah mencatat, bahwa pengalaman-pengalaman masyarakat dalam bekerjasama secara internal maupun eksternal dalam kelompok, kurang mengalami ketegangan-ketegangan yang berlangsung lama dan berakibat pada pengurusan sumber ekonomi, dominasi kekuatan atas sumber-sumber agraria, tetapi justru sebaliknya, terlihat adanya penghormatan terhadap batas-batas teritorial di antara penyebaran komunitas-komunitas lokal. Sebagaimana dicontohkan oleh Korten pada ketiga studi kasusnya tersebut di atas.

Demikian juga Dove (Susantyo, 2002) telah menggambarkan hal ini. Dimana terdapat keunikan sekaligus kandungan nilai-nilai inovatif dari pengalaman-pengalaman masyarakat yang tercerminkan pada kebudayaan tradisionalnya. Secara garis besar, Dove menyebut ada empat pengalaman dasar yang dimiliki masyarakat, yaitu : 1) sistem kepercayaan tradisional mengandung sistem pengetahuan

yang bersifat empiris tentang dunia nyata; 2) sistem ekonomi tradisional, perladangan berpindah, berburu dan meramu, pengumpul sagu, mengandung pengetahuan tentang bagaimana mengeksploitasi lingkungan setempat, juga mengandung sumbangan kepada ekonomi nasional. Konsumsi komunal melalui upacara tradisional memainkan peranan penting dalam memelihara organisasi sosial; 3) di bidang lingkungan, sistem kepercayaan tradisional mengatur suatu keseimbangan terbaik antara populasi manusia, binatang dan sumber-sumber tanah; 4) norma masyarakat tradisional tidak statis, melainkan merupakan suatu penyesuaian dan perubahan terus menerus. Masyarakat tradisional dapat menerima perubahan yang mendasar dan diprakarsai dari luar, jika perubahan itu sesuai dengan kepentingan masyarakat yang bersangkutan.

Pengalaman-pengalaman dasar yang dimiliki masyarakat tersebut tentu merupakan sumber-sumber motivasi, kreatifitas, dan kontrol. Yang kesemuanya itu secara keseluruhan membentuk potensi kekuatan gagasan yang berguna bagi proses identifikasi kebutuhan, perumusan atau pemilihan kebijakan yang tepat, serta pelaksanaan kebijakan tersebut dalam program pembangunan. Segala upaya pembangunan yang tidak memper-timbangkan pengalaman-pengalaman dasar dari masyarakat telah terbukti tidak menghasilkan suatu kemampuan atau daya dukung lingkungan dan ketahanan sosial. Degradasi sumber daya alam dan konflik sosial yang ditimbulkan oleh proses pembangunan merupakan contoh dari kegagalan ini.

Faktor strategis lain yang dimiliki masyarakat ialah kekuatan politis, dimana masyarakat sesungguhnya merupakan realitas politis. Pemerintah mau tidak mau memerlukan dukungan masyarakat untuk

menguji atau melegitimasi kebijaksanaan yang mereka jalankan. Aspek ini berkaitan dengan fungsi organisasi sosial yang dimiliki masyarakat. Masyarakat memiliki infrastruktur sosial, termasuk di dalamnya sistem kepemimpinan tradisional (Ostrom, 1993). Beberapa isyarat yang diberikan oleh Ostrom dkk, bahwa kelembagaan tradisional mempunyai suatu sistem pengambilan keputusan yang dapat mendistribusikan hak dan tanggung jawab anggota masyarakat dalam proses pemeliharaan dan pembagian manfaat yang lebih adil, dan berkesinambungan terhadap fasilitas pembangunan. Contoh pengalaman Korten pada kasus Badan Pengembangan Produk Susu Nasional di India serta Pelayanan Keluarga Berencana Berbasis Desa di Thailand, merupakan sebuah bukti keniscayaan itu, dimana masyarakat mengelola suatu institusi yang mandiri dan cenderung lebih menampakkan keberlanjutan manfaat dari fasilitas pembangunan yang ada.

Dari aspek pokok yang diuraikan di sini ialah pengalaman-pengalaman yang terwujud dalam kearifan budaya dan kepemimpinan lokal, merupakan faktor strategis untuk mengorbitkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Perlunya kejelasan hal-hal strategis ini, untuk memberi arah yang jelas terhadap intervensi kepentingan yang kadang mengacaukan arti dan pelaksanaan partisipasi masyarakat.

IV. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA

Mitchell (1994) menggunakan salah satu pendekatan yang disebutnya "*stresses on*", yaitu tekanan dan kemampuan orang-orang serta lingkungan perdesaan. Disebut juga dalam tulisan Korten (Syahrir dan

Korten, 1988), bahwa konsep pembangunan yang berpusat pada rakyat salah satu bagian pentingnya adalah memberi perhatian terhadap daerah perdesaan. Sayogyo (1997) mengatakan, bahwa keberlanjutan penghidupan keluarga (keberlanjutan dalam bernafkah) harus didalami bersama arti pembangunan masyarakat desa berkelanjutan.

Dengan demikian, pembangunan perdesaan merupakan bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan. Tentunya hal ini perlu dipahami bersama, bahwa wilayah dan komunitas di perdesaan ternyata belum diletakkan pada prioritas yang tinggi dalam kebijaksanaan pembangunan dibanding pembangunan di wilayah perkotaan. Ada banyak studi yang menerangkan keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi di kota dengan masalah-masalah yang muncul di perdesaan. Misalnya masalah migrasi, menurunnya daya dukung lahan dan degradasi sumber alam yang disebabkan eksploitasi dalam penguasaan dan pengusahaan tanah, hutan, tambang dan air. Di lain pihak, populasi penduduk secara umum terdapat di wilayah perdesaan *vis-a-vis* menurunnya distribusi dalam pemanfaatan sumber daya alam yang semakin sempit. Kemudian melemahnya kreativitas budaya disebabkan oleh pergeseran nilai dalam pola kerja dan pandangan hidup modern, menjadi satu aspek tersendiri dari hadirnya masalah-masalah kemiskinan di perdesaan.

Sesungguhnya, pembangunan perdesaan bukan upaya yang baru di Indonesia. Bahkan hal ini telah dicanangkan dalam berbagai kebijaksanaan pembangunan nasional sejak awal kemerdekaan, dengan sasaran yang sama yaitu berupaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Suatu hal yang telah menyadarkan kita, bahwa persoalan

penting yang dihadapi ialah belum tepatnya strategi pembangunan perdesaan. Sebagaimana yang telah dikemukakan, bahwa jalan pemikiran yang dianggap relevan dengan berbagai kondisi yang dihadapi saat ini, ialah melaksanakan strategi pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini, wilayah dan komunitas perdesaan menempati prioritas yang tinggi dalam kebijaksanaan pembangunan nasional, khususnya dalam upaya menanggulangi kemiskinan.

Pembangunan perdesaan yang memberi fokus pada upaya penanggulangan kemiskinan, jika diorientasikan untuk mewujudkan keberlanjutan proses dan manfaatnya di masa depan, maka strategi yang penting dilaksanakan ialah menumbuhkan pembangunan yang berdasarkan kepercayaan diri (*self-reliant development*) (Tjokrowinoto, 1996). Strategi ini sebenarnya sudah tercermin dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melalui program IDT (Inpres Desa Tertinggal). Sebagaimana dikemukakan Budi Soeradji dan Mubyarto (1998), upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui proses penguatan penduduk miskin yang mencakup lima aspek yaitu; pengembangan sumber daya manusia, penyediaan modal kerja, penciptaan peluang dan kesempatan berusaha, mengembangkan kelembagaan penduduk miskin, dan penciptaan sistem pelayanan kepada penduduk miskin yang sederhana dan efisien. Melalui jalur pendekatan tersebut, penduduk miskin diharapkan mampu dengan kekuatannya sendiri menanggulangi kemiskinannya, serta meningkatkan kesejahteraannya secara memadai dan berkelanjutan.

Namun keberhasilan strategi atau pendekatan ini tentu saja tidak mudah. Laporan-laporan program IDT telah memberikan gambaran tentang banyak hal

yang sudah dilakukan melalui pelaksanaan program pemerintah. Misalnya, pemberian kredit, pembentukan kelompok, pelatihan-pelatihan usaha kecil, pelestarian lingkungan melalui pengelolaan hutan rakyat, dan lain-lain sebagaimana dilaporkan oleh Budi dan Mubyarto, (Mubyarto, 1998). Tetapi, dibalik itu kita tidak pernah mendengar suatu laporan dari masyarakat yang secara langsung dan kontinyu menggambarkan perkembangan mereka dari tahun ke tahun. Sehingga semua pihak dapat menjadi yakin bahwa keberhasilan masyarakat bukan hanya bertepatan dengan saat-saat dimana peneliti, LSM, penyuluh pertanian tinggal di desa. Setelah itu kemajuan mereka atau bahkan kegagalan mereka tidak terpantau lagi ketika para peneliti dan fasilitator-fasilitator itu telah habis jangka waktu kontraknya dan pulang ke kota. Banyak informasi yang kita terima secara meyakinkan adanya sengketa pertanahan antara petani dan pengusaha perkebunan, kegagalan panen, raibnya bantuan dana kelompok, dan sebagainya. Secara konseptual pendekatan yang dicanangkan sudah mengarah pada jalan yang tepat, tetapi salah satu hal yang perlu disadari bahwa hasil dari pendekatan yang digunakan itu secara umum belum mencapai kondisi yang diinginkan, yaitu kemandirian masyarakat perdesaan.

Aspek yang ingin dikemukakan di sini ialah pelaksanaan partisipasi masyarakat. Kita telah memiliki konsep yang standar mengenai model partisipasi, tentunya telah dapat memenuhi pertimbangan logika ilmiah, karena digali berdasarkan pengalaman-pengalaman dalam pembangunan di perdesaan. Namun ada yang perlu dipertimbangkan secara serius, yaitu apakah pelaksanaan partisipasi masyarakat itu telah sesuai dengan aspek-aspek yang strategis yang terkandung dalam sistem

komunitas lokal. Yang dimaksudkan dengan aspek strategis tersebut ialah pembangkitan partisipasi masyarakat berdasarkan pengalaman-pengalaman yang terwujud dalam kearifan budaya dan kepemimpinan lokal. Di sini hendak dikatakan, bahwa aspek strategis partisipasi harus diletakkan dalam konteks yang berbeda dengan konsep-konsep ilmiah yang kita miliki, khususnya bila diterapkan pada tingkat lapangan. Karena banyak kasus menunjukkan, bahwa implementasi konsep-konsep partisipasi inipun masih mengalami kegagalan. Terutama bila dilihat dari gambaran berkelanjutan suatu program yang dilak-sanakan.

Untuk mewujudkan sistem pertanian yang baik, dalam teknik pengelolaan maupun pemeliharaan, tidak cukup hanya dengan memperagakannya melalui unit percontohan agar masyarakat secara bersama-sama mempelajarinya, atau sekedar memfasilitasi mereka untuk merumuskan sendiri cara-cara mengorganisasikan suatu proses pembelajaran. Faktor strategis yang perlu dipertimbangkan ialah kearifan budaya dalam praktek-praktek bertani. Mereka perlu terlibat untuk membuat keputusan dalam hal penggunaan waktu, memperhitungkan; bahaya, ancaman, dan tekanan, mempertimbangkan benda-benda apa atau tindakan bagaimana yang boleh atau tidak digunakan, kapan dan di mana suatu kegiatan dapat dilaksanakan. Secara ekstrim dapat dikatakan jika bentuk inovasi pertanian yang datang dari luar, kemudian ditolak oleh masyarakat, hal ini merupakan bentuk partisipasi dipandang dari sudut kearifan budaya. Sebab mereka telah menyumbangkan suatu upaya menghindari malapetaka jika dikemudian hari hasil dari inovasi tersebut ternyata mendatangkan kerugian bagi masyarakat, baik secara fisik maupun mental.

Kepemimpinan lokal juga merupakan faktor strategis dari partisipasi masyarakat. Hal ini berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembentukan suatu kelembagaan ekonomi dan saluran pendapat publik terhadap kebijaksanaan pembangunan. Kita tidak hanya cukup meyakinkan diri, bahwa pemimpin lokal lebih mempunyai pengaruh secara informal dari pada pemimpin formal terhadap anggota masyarakat. Oleh karena itu, dengan menggunakan pengaruh ini masyarakat dapat dilibatkan dalam program ekonomi dan memberi dukungan terhadap suatu kebijakan. Hal yang paling mendasar di sini ialah ketaatan masyarakat terhadap adat yang menyatukan mereka, dimana pemimpin sebagai simbol adat dan memiliki kaidah-kaidah tersendiri dalam memutuskan masalah-masalah yang dihadapi anggota masyarakat. Pengalaman-pengalaman yang berbeda di masyarakat dilihat dari kesatuan-kesatuan adat, perlu mengilhami cara-cara pelibatan masyarakat dalam pembentukan kelompok, atau dalam proses penggalian pendapat umum. Pelibatan masyarakat dalam proses pembentukan kelembagaan apapun harus mempertimbangkan cara-cara di mana mereka menunjukkan ketaatan terhadap adat. Dengan demikian mereka dapat lebih meyakini manfaat-manfaat yang timbul dari tugas dan kewajiban dalam memelihara, melindungi, dan mengembangkan hal-hal yang dimiliki oleh kesatuan adatnya. Makna yang penting ditarik dari sini ialah pelibatan mereka dalam proses pembangunan perdesaan didasarkan pada komitmen adat untuk mengatur suatu organisasi sosial yang mandiri.

V. PENUTUP

Pembangunan perdesaan merupakan salah satu bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan, terutama untuk menciptakan ketahanan sosial. Oleh karena itu peranan masyarakat menjadi sangat sentral dalam pelaksanaan strategi ini. Salah satu aspek penting dari usaha untuk menciptakan ketahanan sosial itu ialah menumbuhkan partisipasi masyarakat. Perkembangan pemikiran mengenai partisipasi telah melahirkan konsep standar karena telah digali dari pengalaman-pengalaman kegagalan pembangunan perdesaan di masa lalu. Secara konseptual partisipasi telah diletakkan pada peranan komunitas lokal dalam seluruh proses pembangunan.

Untuk memberi arah yang jelas pada pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perdesaan, maka perlu mempertimbangkan faktor strategis partisipasi masyarakat dalam sistem komunitas lokal. Di antara faktor strategis tersebut ialah pengalaman-pengalaman masyarakat yang terwujud dalam kearifan budaya dan kepemimpinan lokal. Dengan mempertimbangkan faktor strategis dalam sistem komunitas lokal itu, diharapkan pelaksanaan partisipasi masyarakat akan menyumbang pada usaha mencapai kemandirian masyarakat.

Dalam program pembangunan perdesaan, pengetahuan tentang apa yang dibutuhkan masyarakat serta kemampuan kelembagaan ("organisasi pembantu") juga sangat terbatas. Untuk itu, upaya pendekatan untuk senantiasa selalu belajar kepada masyarakat melalui pendekatan "proses belajar" dalam proses pembangunan yang terjadi, merupakan sebuah keharusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cernea, Michel M. 1993, *"The Sociological Approach to Sustainable Development" in Marking Development Sustainable: From Concept to Action*. Ismail Serageldin dan Andrew Steer (ed). Papare Series No. 2 World Bank.
- Korten, D.C. dan Syahrir (ed). 1988, *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta; Yayasan Obor Indonesia.
- Mitchel, Bruce. 1994, *Sustainable Development at Village Level in Bali, Indonesia Human Ecology an Interdisciplinary Journal*. Vol. 22 (3) pp. 189-211.
- Ostrom, Elinor, Larry Schroode dan Susan Wynne. 1993, *Institutional Incentive and Sustainable Development: Infrastructure Policies in Perspective*. Oxford; Westview Press.
- Rahardjo, Dawam. 1983, *Esei-esei Ekonomi Politik*. Jakarta; LP3ES.
- Sayogyo. 1997, *Pembangunan Masyarakat Desa Berkelanjutan*, Makalah pada Semiloka Gerakan Mandiri Mem-bangun Desa di Palu Sulawesi Tengah.
- Sayogyo dalam Sitorus Dkk. ed. 1996, *Memahami dan Menanggulangi Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Soelaiman, Munandar. *Dinamika Masyarakat Transisi, Mencari Alternatif Sosiologi dan Arah Perubahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soeradji, Budi dan Mubyarto. 1998, *Gerakan Penanggulangan Kemiskinan*. Laporan Penelitian di Derah-daerah. Jakarta: Aditya Media.
- Susantyo, Badrun. 2002, *Aspek Strategis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Jurnal Ilmiah pekerjaan Sosial "PEKSOS". Vol 1 No. 1, Mei 2002. Bandung: STKS.
- . 2003, *Mencoba Memahami Partisipasi "Gaya Lain" Dalam Komunitas Adat Terpenil (KAT)*. Jurnal SIKAT. Edisi I Tahun 2003. Jakarta. Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT). Departemen Sosial RI.
- Tjokrowinoto. 1996, *Pembangunan, Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Drs. Badrun Susantyo, M.Si. Menyelesaikan S2 dari Institute Perstania Bogor. Staf pada Puslitbang Kesejahteraan Sosial. Saat ini sebagai kandidat Doktor bidang Ilmu Pekerjaan Sosial di Penang Malaysia.